

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan dalam sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ateng Syafrudin, 2002, *Perizinan Untuk Berbagai Kegiatan*, Gramedia, Jakarta.
- CS.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pemerintah Daerah Indonesia Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Daan Suganda, 1992, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintahan di Daerah*, Sinar Baru, Bandung.
- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.
- I Gusti Bagus Arjana, 2016, *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Juniarso Ridwan dan Achmad SodikSudrajat, 2012, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung.
- Muin Fahmal, 2006, *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, UII Pres Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Otto Soemarwoto, 2003, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada Univ, Yogyakarta.
- Rianto Nugroho D, 2000, *Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi)*, Elekmedia Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Septi Nur Wijayanti & Iwan Satriawan, 2009, *Hukum Tata Negara, (teori & prakteknya di Indonesia)*, LP3M UMY, Yogyakarta.
- Siti Sundari Sangkuti, 1996, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga Univ. Press, Surabaya.
- Suharizal dan Muslim Chaniago, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah*

Perubahan UUD 1945, Thofa Media, Yogyakarta.

Sunarno Siswanto, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syaukani, dkk., 2009, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

The Liang Gie, 1968, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.

Jurnal

Adrian Adi Hamzana, “Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat”, *Jurnal Pena Justisia Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 17 No. 2, (2017).

Daryanti, “Kontribusi Objek Wisata dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13 No. 1, (2013).

I Made Adikampana, “Pariwisata Alam & Pembangunan Ekonomi Masyarakat Lokal”, *Jurnal Analisis Pariwisata Dikotomi Pariwisata & Lingkungan Hidup*, Vol. 9 No 1, (2009).

M. Rendi Aridhayandi, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. 4, (2018).

Masita Hi Modim, Andi Samsu Alam, dan Andi Muh. Rusli, ” Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat “, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3 No. 1, (2010).

Rasyid Thaha, “Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 No. 2, (2012).

Sarsiti & Muhammad Taufiq, “Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Wisatawan yang Mengalami Kerugian di Obyek Wisata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No 1, (2012).

Sujali, “Pengelolaan Usaha Jasa Pariwisata Berbasis Pengembangan Masyarakat”, *Jurnal Destinasi Pariwisata*, Vol. 22 No. 2, (2008).

Suryo Pratolo, “Peran Otonomi Daerah untuk Meningkatkan Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Instrumen Manajemen dalam Kebijakan

Alokasi Belanja Pelayanan Publik", *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 12 No. 1, (2011).

Takariadinda Diana Ethika, "Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 di Kabupaten Sleman" *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1 No. 2, (2016).

Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

Internet

Fitri N. Heriani, 2018, *Tidak Semua Perizinan Bisa Diurus melalui OSS* <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b4eb16b35adc/catat-tidak-semua-perizinan-bisa-diurus-melalui-oss/>, diakses pada tanggal 29 Desember 2018.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, https://bantulkab.go.id/profil/sekilas_kabupaten_bantul.html, diakses pada tanggal 22 November 2018.

Sus, 2018, *Banyak Kawasan Wisata Bantul Belum Miliki TDUP*, <http://jogja.tribunnews.com/2018/05/24/banyak-kawasan-wisata-bantul-belum-miliki-tdup>, diakses pada tanggal 26 September 2018.